

**KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [dsperakim@jatengprov.go.id](mailto:dsperakim@jatengprov.go.id)

<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	: <b>NON URUSAN</b>
Bidang/ Seksi	: <b>SUBAGIAN PROGRAM</b>
Program	: <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>A. Sub Kegiatan</b>	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Program	: Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	: Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD
<b>B. Sasaran Sub kegiatan</b>	: Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah dari seluruh bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>C. Output kegiatan</b>	
1. Satuan	: 1) 1 (Satu) Dokumen Laporan Monev dan Pengendalian Kegiatan Tahun Berjalan; 2) 1 (Satu) Dokumen LKPJ tahun 2022; 3) 1 (Satu) Dokumen LKjIP tahun 2022; 4) 1 (Satu) Dokumen LPPD tahun 2022; 5) 1 (Satu) Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Triwulanan (Renja, RKPD serta SAKIP); 6) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik; 7) 1 (Satu) Dokumen Evaluasi SPIP.
2. Lokasi	: Provinsi Jawa Tengah
<b>D. Latar belakang</b>	: Proses monitoring dan evaluasi dalam setiap program kegiatan sangat perlu dilaksanakan. Hal ini untuk memantau dan mengidentifikasi proses dan hasil pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala dan hambatan yang kemungkinan muncul sehingga kedepannya dapat dicegah agar tidak terjadi lagi. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini sebagai masukan dalam perencanaan berikutnya. Terkait dengan perihal tersebut maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat mawadahi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.  Pada pelaksanaan proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah maka diwadahi dalam Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan dapat

	lebih berkualitas dan menjadi umpan balik bagi proses perencanaan kedepannya.
<b>E. Lingkup kegiatan</b>	<p><b>a). Maksud dan Tujuan kegiatan;</b> Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b>Permasalahan</b> Pergerakan data capaian program/ kegiatan yang dinamis dapat mengakibatkan adanya ketidaksinkronan antar dokumen laporan capaian kinerja yang menjadikan laporan tidak akuntabel.</p> <p><b>Hasil/Outcome</b> Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah yang terukur dan akuntabel pada pelaksanaan tahun anggaran kegiatan.</p> <p><b>Dampak/Impact</b> Adanya perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD serta dokumen pelaporan capaian dan evaluasi kinerja SKPD yang berkualitas.</p> <p><b>b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);</b> -</p> <p><b>c). Kebutuhan Waktu;</b> 12 (Dua Belas) bulan</p> <p><b>d). Siapa yang terlibat;</b> ASN dan Masyarakat</p>
<b>F. Komponen kegiatan</b>	
	<b>• Kebutuhan Operasional Kegiatan</b>
1. Kebutuhan belanja pegawai	: - Kebutuhan belanja pegawai untuk tenaga teknis Kegiatan (S1) sebanyak 2 (dua) orang selama 12 (Duabelas) bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: - Narasumber : 6 Orang Eselon 2 - Instansi Narasumber : Provinsi Jawa Tengah dan Profesional/ Akademisi - Moderator : 2 Orang
3. Koordinasi	: - <b>Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :</b> a). Koordinasi untuk Monev dan Pengendalian Kegiatan Tahun Berjalan = 14 (Empat Belas) Kali b). Koordinasi untuk Penyusunan LKPJ, LPPD dan LKJIP tahun 2022 = 9 (Sembilan) Kali c). Koordinasi untuk Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Triwulanan (Renja, RKPD serta SAKIP)= 4 (Empat) Kali d). Koordinasi untuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik = 6 (enam) kali; e). Koordinasi untuk Penyusunan Laporan Evaluasi SPIP = 2 (dua) Kali - <b>Tujuan koordinasi yang dilakukan :</b> a). Koordinasi Monev dan Pengendalian Kegiatan Tahun Berjalan untuk memantau progres pelaksanaan seluruh kegiatan di DISPERAKIM; mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan kegiatan b). Koordinasi dalam Penyusunan LKPJ, LPPD, dan LKJIP Tahun 2022 untuk mengkompilasi dan mengolah data-data capaian realisasi kinerja Dinas Tahun 2022 c). Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik untuk memantau progres pelaksanaan Pengelolaan

	Informasi Publik serta mengidentifikasi dan menangani kemungkinan permasalahan yang muncul terkait informasi publik
	d). Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulanan (Renja, RKPD serta SAKIP) dan Semesteran SPIP Tahun 2023 untuk mengkompilasi dan mengolah data-data capaian realisasi kinerja Dinas Tahun 2023 dan mengevaluasi capaian tersebut.
	- <b>Pihak yang terlibat dalam koordinasi :</b>
	a). ASN DISPERAKIM, OPD Lain (PUSAT, Prov. Jateng, dan Kabupaten/ Kota) dan Masyarakat
	- <b>Frekuensi kebutuhan dan waktu :</b>
	a). Koordinasi untuk Monev dan Pengendalian Kegiatan Tahun Berjalan dilaksanakan secara bulanan
	b). Koordinasi untuk Penyusunan LKPJ, LPPD dan LKJIP tahun 2023 dilaksanakan secara tahunan
	c). Koordinasi untuk Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Triwulanan (Renja, RKPD serta SAKIP) dilaksanakan secara triwulanan
	d). Koordinasi untuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan secara caturwulanan
	e). Koordinasi untuk Penyusunan Laporan Evaluasi SPIP dilaksanakan secara semesteran
4. Tinjauan lapang	: - <b>Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan</b>
	a). Memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pengampu
	b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
	- <b>Pihak yang terlibat :</b>
	ASN Disperakim, ASN Tim TAPD (BAPPEDA dan BANGDA dan BPKAD Prov. Jateng) & ASN OPD Kab/ Kota
	• <b>Kebutuhan Belanja Modal</b>
1. Kebutuhan/dukungan alat/bahan/ barang	: -
2. Pengadaan tanah/ lahan	: -
<b>G. Anggaran Sub Kegiatan</b>	: <i>Th 2022 : 227.204.000</i>
	<i>Th 2023 : 400.000.000</i>
	<i>Th 2024 : 500.000.000</i>
<b>Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)</b>	
<b>H. Penutup</b>	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Semarang, November 2021

Disusun Oleh:  
Kepala Sub Bagian Program

Diketahui Oleh:  
Sekretaris

**ELYTA VERY WIJAYA, S.IP., M.SOS**

Penata  
NIP. 19820408 201101 2 004

**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSI**

Pembina Tk. I  
NIP. 19731113 199803 1 003





**KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	: <b>NON URUSAN</b>
Bidang/ Seksi	: <b>SUBAGIAN PROGRAM</b>
Program	: <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>A. Sub Kegiatan</b>	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Program	: Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun
<b>B. Sasaran Sub kegiatan</b>	: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dari seluruh bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>C. Output Sub kegiatan</b>	
1. Satuan	: 1). 1 (Satu) Dokumen Laporan Sosialisasi Rumpun PU TA 2023; 2). 1 (Satu) Dokumen Renja OPD Tahun 2024; 3). 1 (Satu) Dokumen PK Tahun 2023; 4). 1 (Satu) Dokumen RKT Tahun 2023; 5). 1 (Satu) Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA. 2023; 6). 1 (Satu) Dokumen RKAP TA. 2023 7). 1 (Satu) Dokumen DPPA TA 2023; 8). 1 (Satu) Dokumen RKA TA. 2024; 9). 1 (Satu) Dokumen DPA TA 2024.
2. Lokasi	: Provinsi Jawa Tengah
<b>D. Latar belakang</b>	: Selama ini dalam proses penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan serta penganggaran terkadang masih terjadi ketidaksinkronan dan ketidaksinergisan antar dokumen. Hal ini mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tingkat OPD. Selain itu juga dampak lebih luasnya adalah akan menghambat pencapaian target indikator kinerja OPD yang tentu saja juga mempengaruhi pencapaian target kinerja provinsi. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan yang dapat memwadahi proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Maka pada pelaksanaan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran program maupun kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah diwadahi dalam Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat lebih sinkron, sinergis dan berkualitas.

<p><b>E. Lingkup kegiatan</b></p>	<p><b>a). Maksud dan Tujuan kegiatan;</b> Menyusun dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b>Permasalahan</b> Ketidaksinkronan dan ketidaksinergisan dokumen perencanaan yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tingkat OPD, yang lebih luasnya dapat menghambat pencapaian target indikator kinerja OPD yang tentu saja juga mempengaruhi pencapaian target kinerja provinsi.</p> <p><b>Hasil/Outcome</b> Tersusunnya dokumen perencanaan program/ kegiatan dan penganggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><b>Dampak/Impact</b> Adanya sinergitas dan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.</p> <p><b>b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);</b> -</p> <p><b>c). Kebutuhan Waktu;</b> 12 (Dua Belas) bulan</p> <p><b>d). Siapa yang terlibat;</b> OPD, Akademisi, LSM dan Masyarakat</p>
<p><b>F. Komponen kegiatan</b></p>	
<p><b>• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan</b></p>	
<p>1. Kebutuhan belanja pegawai</p>	<p>: – Kebutuhan belanja pegawai untuk tenaga teknis Kegiatan (S1) sebanyak 2 (Dua) orang selama 12 (dua belas) bulan</p>
<p>2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar</p>	<p>: – Narasumber : 15 Orang Eselon 2 dan 2 orang unsur DPRD – Instansi Narasumber : Provinsi Jawa Tengah Moderator : 6 Orang</p>
<p>3. Koordinasi</p>	<p>:</p>
<p>4. Tinjauan lapang</p>	<p>: – <b>Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan:</b></p> <p>a). Koordinasi untuk Peyusunan Laporan Sosialisasi Rumpun PU TA 2023= 1 (Satu) Kali</p> <p>b). Koordinasi untuk Peyusunan Dokumen Renja OPD Tahun 2024 = 1 (Satu) Kali</p> <p>c). Koordinasi untuk Peyusunan Dokumen PK Tahun 2023 = 1 (Satu) Kali</p> <p>d). Koordinasi untuk Peyusunan Dokumen RKT Tahun 2024 = 1 (Satu) Kali</p> <p>e). Koordinasi untuk Peyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA. 2023 = 1 (Satu) Kali</p> <p>f). Koordinasi untuk Peyusunan Dokumen RKAP TA. 2023 &amp; Dokumen DPPA TA 2023 = 2 (Dua) Kali</p> <p>g). Koordinasi untuk Peyusunan Dokumen RKA TA. 2024 &amp; Dokumen DPA TA 2024 = 2 (Dua) Kali</p> <p>– <b>Tujuan koordinasi yang dilakukan:</b></p> <p>a). Koordinasi Peyusunan Laporan Sosialisasi Rumpun PU TA 2023 untuk :</p> <p>✓ Menyampaikan informasi program dan kegiatan pembangunan pada bidang infrastruktur TA. 2022 baik yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN</p>

- ✓ Mensosialisasikan dan mensinkronisasi program dan kegiatan bidang infrastruktur yang dibiayai APBD Prov. Jateng dan APBN
- ✓ Meminimalkan duplikasi pekerjaan dan lokasi yang didanai ABBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN
- b). Koordinasi Peyusunan Dokumen Renja OPD Tahun 2024, PK Tahun 2023, RKT Tahun 2024 untuk mengumpulkan dan mengkompilasi data-data terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan yang disusun
- c). Koordinasi Peyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA. 2023 untuk mengumpulkan dan mengkompilasi data-data terkait dengan penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA. 2023
- d). Koordinasi Peyusunan Dokumen RKAP TA. 2023 & Dokumen DPPA TA. 2023 serta Dokumen RKA TA. 2024 & Dokumen DPA TA. 2024 untuk mengumpulkan dan mengkompilasi data-data terkait dengan dokumen-dokumen penganggaran yang disusun.

– **Pihak yang terlibat dalam koordinasi:**

ASN DISPERAKIM, OPD Lain (PUSAT, Prov. Jateng, dan Kabupaten/ Kota) dan Masyarakat

– **Frekuensi kebutuhan dan waktu :**

**Penyusunan** dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran dilakukan setiap tahun sekali (selama beberapa bulan sesuai kebutuhan)

• **Kebutuhan Belanja Modal**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang | : - |
| 2. Pengadaan tanah/ lahan                  | : - |

<b>G. Anggaran Sub Kegiatan</b>	: Th 2022	: 256.108.000
	Th 2023	: 500.000.000
	Th 2024	: 600.000.000

**Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)**

**H. Penutup** : KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, November 2021

Disusun Oleh:  
Kepala Sub Bagian Program

Diketahui Oleh:  
Sekretaris

**ELYTA VERY WIJAYA, S.IP., M.SOS**

Penata  
NIP. 19820408 201101 2 004

**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi**

Pembina Tk. I  
NIP. 19731113 199803 1 003





**KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN  
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434

Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	: <b>WAJIB PELAYANAN DASAR</b>
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	: <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
Program	: Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>A. Sub Kegiatan</b>	: Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dukungan terhadap indikator Program	: Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	: Persentase ketercapaian Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun
<b>B. Sasaran Sub kegiatan</b>	: Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Penguasaan Pengetahuan dan Sistem Aplikasi
<b>C. Output Sub kegiatan</b>	
1. Satuan	: Tersedianya dana untuk kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Lokasi	: Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
<b>D. Latar belakang</b>	: Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna
<b>E. Lingkup kegiatan</b>	: <b>a). Maksud dan Tujuan kegiatan;</b> Menyediakan Dana untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebagai penunjang Pelaporan Keuangan meliputi Realisasi Anggaran, Neraca dan Pelaporan Arus Kas yang ditujukan memenuhi Kebutuhan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  <b>Permasalahan</b> Diperlukan dan tersedianya Sistem dan Prosedur serta dana Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Dalam Penyajian Laporan Realisasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah yang baik terhadap Pelaksanaan Anggaran  <b>Hasil/Outcome</b> Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Teknis

Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen dan Pengadministrasian Keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

**Dampak/Impact**

Penyampaian/ Penyediaan informasi tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan, Neraca dan Laporan Keuangan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Kegiatan Operasional dan Hasil yang direalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

**b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);**

-

**c). Kebutuhan Waktu;**

12 (Dua Belas) bulan

**d). Siapa yang terlibat;**

ASN DISPERAKIM, ASN dari Dinas terkait yang menjadi Narasumber dan Moderator

**F. Komponen kegiatan**

**• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Kebutuhan belanja pegawai   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator</li> <li>- Belanja Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Belanja Makan dan Minum Rapat</li> <li>- Belanja ATK</li> </ul>  |
| 2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar | : | -   |
| 3. Koordinasi                  | : | <p><b>- Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Koordinasi untuk persiapan Rapat Semesteran kegiatan Tahun Berjalan = 2 (dua) kali</li> <li>b). Koordinasi untuk Rapat Bulanan = 4 (empat) kali</li> <li>c). Koordinasi untuk Rapat Semesteran kegiatan Tahun Berjalan = 2 (dua) kali</li> </ul> <p><b>- Tujuan koordinasi yang dilakukan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Koordinasi persiapan Rapat Semesteran Kegiatan Tahun Berjalan untuk memantau progres pelaksanaan sebelum Rapat Semesteran; mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan kegiatan</li> <li>b). Koordinasi Rapat Bulanan untuk memantau progres pelaksanaan Pengelolaan keuangan serta mengidentifikasi dan menangani kemungkinan permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan anggaran di DISPERAKIM setiap bulannya</li> <li>c). Koordinasi Rapat Semesteran untuk menjembatani kendala/masalah yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan di awal dan akhir tahun</li> </ul> <p><b>- Pihak yang terlibat dalam koordinasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Pengelola Keuangan, Kegiatan dan ASN Disperakim</li> </ul> <p><b>- Frekuensi kebutuhan dan waktu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Koordinasi untuk persiapan Rapat Semesteran Kegiatan Tahun Berjalan dilaksanakan secara 2 kali (awal dan akhir tahun sebelum rapat Semesteran)</li> <li>b). Koordinasi untuk Rapat Bulanan dilaksanakan 4 kali (setiap Triwulan)</li> </ul> |

	c). Koordinasi untuk Rapat Semesteran Kegiatan Tahun Berjalan dilaksanakan secara 2 kali (awal dan akhir tahun)
4. Tinjauan lapang	: – <b>Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan</b> a). Memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan. b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.  – <b>Pihak yang terlibat :</b> ASN Disperakim dan NON ASN Disperakim
• <b>Kebutuhan Belanja Modal</b>	
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: -
2. Pengadaan tanah/ lahan	: -
<b>G. Anggaran Sub Kegiatan</b>	: Th 2023 : Rp 32.500.000,- Th 2024 : Rp 35.000.000,- Th 2025 : Rp 35.000.000,-
<b>Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)</b>	
<b>H. Penutup</b>	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Semarang,

2022

Disusun Oleh:  
Kepala Sub Bagian/ Seksi

Diketahui Oleh:  
Sekretaris / Kabid

**ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM,**  
NIP. 19770905 200212 1 004

**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si**  
NIP. 19731113 199803 1 003

**JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2023**

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Bahan Pakai Habis – ATK			■						■			
2	Sub-Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan			■			■			■			■
3	Sub-Sub Kegiatan Jasa Narasumber dan Moderator		■	■									■
4	Sub-Sub Kegiatan Makanan dan Minuman			■			■			■			■